TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN CHINA: STUDI PERBANDINGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

Andre Tanjung

Andretanjung2309@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pencegahan korupsi di kedua negara dengan menyoroti regulasi, kelembagaan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Isu hukum yang dibahas mencakup peran regulasi dalam pemberantasan korupsi, kewenangan lembaga antikorupsi, serta tantangan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan antikorupsi di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem pencegahan berbasis regulasi dan transparansi melalui lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam pengawasan internal dan pelemahan institusional. Sementara itu, China mengadopsi pendekatan yang lebih represif dengan pengawasan ketat oleh Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) dan National Supervisory Commission (NSC), serta menerapkan kebijakan “zero tolerance” yang memungkinkan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Meskipun sistem China lebih efektif dalam menekan angka korupsi, pendekatan yang terlalu keras menimbulkan kritik terkait independensi lembaga pengawas dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Korupsi, Regulasi, Indonesia, China

Abstract

This article aims to analyze the comparison of corruption prevention systems in the two countries by highlighting regulations, institutions and the effectiveness of the policies implemented. Legal issues discussed include the role of regulations in eradicating corruption, the authority of anti-corruption institutions, and challenges in implementing policies. This research uses a normative juridical approach method with analysis of legislation and anti-corruption policies in each country. The research results show that Indonesia implements a prevention system based on regulation and transparency through institutions such as the Corruption Eradication Commission, Attorney General's Office and the National Police, but its effectiveness still faces challenges in terms of internal supervision and institutional

weakening. Meanwhile, China adopted a more repressive approach with strict supervision by the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) and the National Supervisory Commission (NSC), as well as implementing a "zero tolerance" policy that allows for harsh punishments for perpetrators of corruption. Although China's system is more effective in reducing corruption, its overly harsh approach has led to criticism regarding the independence of supervisory institutions and the potential for abuse of power.

Keywords: Corruption, Regulation, Indonesia, China

Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena korupsi di Indonesia dan China menunjukkan tingkat permasalahan yang serius meskipun kedua negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam memberantasnya. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023 dengan skor 34/100, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan¹. Sementara itu, China menempati peringkat 65 dengan skor 45/100, menandakan bahwa meskipun negara ini masih menghadapi masalah korupsi, ada kebijakan yang lebih ketat dalam pemberantasannya². Perbedaan ini mengindikasikan adanya disparitas dalam regulasi, mekanisme penegakan hukum, serta efektivitas kebijakan anti-korupsi yang diterapkan di kedua negara.

Dampak dari korupsi sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan penyalahgunaan anggaran negara, ketimpangan sosial, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Salah satu contoh kasus besar yang mengguncang Indonesia adalah kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri, yang

¹ Nurulia Tiara Sani, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin, "25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 897–906.

² Corruption Perceptions Index, "Transparency International, Corruption Perceptions Index," URL: <https://www.transparency.org/cpi2021> (2022).

merugikan negara hingga Rp 23,7 triliun dan Rp 22,78 triliun³. Sementara itu, di China, meskipun ada kebijakan zero tolerance terhadap korupsi, praktik suap dan gratifikasi masih sering terjadi, terutama dalam sektor politik dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan mencakup distorsi ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, serta terhambatnya inovasi dan investasi asing akibat ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh praktik korupsi.

Secara normatif, kedua negara memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi. Indonesia mengatur korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mengatur berbagai bentuk kejahatan korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga kerugian negara⁴. Sementara itu, China menggunakan kombinasi antara Criminal Law of the People's Republic of China dan kebijakan Partai Komunis China (CPC), di mana tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup jika terbukti melakukan tindak pidana dalam skala besar⁵. Pendekatan hukum yang berbeda ini mencerminkan bagaimana kedua negara memandang korupsi—Indonesia cenderung fokus pada pemidanaan berbasis sistem peradilan yang masih memiliki celah hukum, sedangkan China menerapkan pendekatan represif dengan hukuman yang sangat berat bagi pelaku korupsi.

Meskipun telah memiliki regulasi yang jelas, kedua negara menghadapi isu hukum dalam pemberantasan korupsi. Di Indonesia, intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama. Salah satu contoh nyata adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK tahun 2019, yang mengurangi independensi lembaga ini dalam menangani kasus-kasus besar. Selain itu, banyak pelaku korupsi yang mendapatkan kebijakan pemotongan hukuman melalui remisi atau pembebasan bersyarat, yang semakin

³ Natalis Christian et al., "Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 315–329.

⁴ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.

⁵ Jiang Zemin, "Criminal Law of the People's Republic of China," *Chinese L. & Gov't* 45 (2012): 53.

menurunkan efek jera. Di sisi lain, China menghadapi kritik terkait penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa pihak juga menilai bahwa kebijakan anti-korupsi di China sering digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan oposisi dalam pemerintahan.

Penelitian mengenai perbandingan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Di Indonesia, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, termasuk keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fenomena korupsi masih marak terjadi. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun-tahun terakhir masih tergolong rendah, mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, studi komparatif dengan China, yang memiliki kebijakan hukum lebih ketat terhadap korupsi, menjadi penting untuk mengidentifikasi aspek positif yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah perbedaan pendekatan hukum dan kebijakan antara Indonesia dan China. China dikenal dengan kebijakan anti-korupsi yang sangat tegas, termasuk pemberian hukuman berat seperti hukuman mati bagi koruptor dengan jumlah kerugian yang besar. Sementara itu, di Indonesia, terdapat celah dalam sistem hukum yang memungkinkan koruptor mendapatkan keringanan hukuman, remisi, atau bahkan bebas lebih cepat melalui mekanisme seperti *justice collaborator* atau revisi undang-undang yang melemahkan KPK. Studi ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia dapat diperkuat dengan mengambil pelajaran dari praktik hukum di China, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sistem politik yang berbeda.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dan China dalam menangani tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana model sistem pencegahan korupsi antara Indonesia dan China?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-komparatif, yang berfokus pada perbandingan norma hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia dan China. Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan regulasi, sistem penegakan hukum, serta efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi teori hukum yang berlaku tetapi juga membandingkan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum adalah metode yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, asas, teori, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem kaidah yang bersifat otonom, sehingga analisisnya dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, serta doktrin hukum⁶.

Dalam konteks studi perbandingan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di kedua negara. Misalnya, di Indonesia, hukum tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, di China, korupsi diatur dalam Criminal Law of the People's Republic of China, yang memiliki sanksi lebih berat dibandingkan Indonesia, termasuk hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam jumlah besar. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini dapat menganalisis kesamaan dan perbedaan substansi hukum, efektivitas sanksi pidana, serta kewenangan lembaga pemberantas korupsi di masing-masing negara.

Selain itu, pendekatan normatif juga mencakup analisis terhadap asas hukum yang digunakan dalam perumusan kebijakan anti-korupsi. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sedangkan China menerapkan asas kedisiplinan ketat dan kepemimpinan Partai Komunis dalam sistem hukum pidananya. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana teori dan asas hukum berperan dalam membentuk regulasi yang diterapkan di masing-masing negara.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat data statistik, laporan lembaga antikorupsi, serta studi kasus yang menunjukkan bagaimana efektivitas penerapan hukum dalam praktik di Indonesia dan China. Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah metode yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat⁷. Dengan kata lain, pendekatan empiris menyoroti efektivitas hukum dalam realitas sosial, politik, dan ekonomi, termasuk faktor yang mendukung atau menghambat penerapan hukum tersebut.

Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia dan China, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap kasus korupsi berlangsung di kedua negara. Misalnya, di Indonesia, meskipun telah memiliki KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi, praktik korupsi masih marak terjadi akibat intervensi politik, lemahnya penegakan hukum, serta

⁷ Soerjono Soekanto, "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).

adanya pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara triliunan rupiah menunjukkan masih adanya celah dalam sistem hukum Indonesia yang memungkinkan koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Sebaliknya, di China, pendekatan empiris menunjukkan bahwa hukuman berat, termasuk hukuman mati, membuat angka korupsi cenderung menurun dibandingkan dengan Indonesia. Namun, penerapan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi di China juga mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia karena dianggap terlalu represif dan sering digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana penerapan hukum dalam praktik di masing-masing negara serta faktor sosial-politik yang mempengaruhinya.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di kedua negara, seperti UU Tipikor Indonesia dan Criminal Law of the People's Republic of China, serta putusan pengadilan terkait kasus korupsi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan dari Transparency International, serta penelitian terdahulu yang membahas pemberantasan korupsi di Indonesia dan China. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta artikel berita yang relevan dalam memberikan konteks terhadap fenomena korupsi di kedua negara.

Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan akan disusun, dikategorikan, dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan sistem hukum korupsi di Indonesia dan China. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi, pola penegakan hukum, serta dampak

dari kebijakan yang diterapkan di masing-masing negara. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari sistem hukum China.

Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Sistem Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China

Sistem Hukum Pidana

Indonesia menganut sistem hukum civil law atau hukum tertulis, yang berarti bahwa sumber utama hukum pidana berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi⁸. Sistem hukum pidana Indonesia berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda dan telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum modern. Dalam menangani tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁹. Hukum di Indonesia lebih berorientasi pada due process of law, yang menekankan pada prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan prosedur peradilan yang mengutamakan hak-hak terdakwa.

Dalam sistem pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap kasus korupsi melibatkan beberapa institusi utama, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). KPK memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi dan lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya

⁸ Habsy Ahmad and Chairul Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.

⁹ Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.

penegakan hukum, intervensi politik, serta praktik korupsi yang masih marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta.

Sementara itu, China menganut sistem hukum socialist law atau hukum sosialis yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem hukum civil law yang diterapkan di Indonesia¹⁰. Sistem hukum pidana China lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi Partai Komunis China (PKC), sehingga peraturan hukum sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik dan kebijakan negara. Hukum pidana di China dikodifikasi dalam Criminal Law of the People's Republic of China, yang pertama kali disahkan pada tahun 1979 dan telah mengalami berbagai revisi untuk memperkuat pemberantasan kejahatan, termasuk korupsi¹¹.

China memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam menangani tindak pidana korupsi. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman mati bagi kasus korupsi dengan nilai kerugian yang sangat besar. Hukuman ini didasarkan pada prinsip bahwa korupsi adalah ancaman serius terhadap stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, China memiliki lembaga khusus seperti Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) yang berfungsi sebagai alat pengawasan internal bagi anggota Partai Komunis China, serta National Supervisory Commission (NSC) yang bertanggung jawab atas investigasi dan pemberantasan korupsi secara lebih luas¹². Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum pidana di China cenderung lebih represif dan kurang mengutamakan due process of law, di mana pemerintah memiliki wewenang besar dalam menentukan vonis tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Jinting Deng, "The National Supervision Commission: A New Anti-Corruption Model in China," *International Journal of Law, Crime and Justice* 52 (2018): 58–73.

¹¹ Ian Dobinson, "The Criminal Law of the People's Republic of China (1997): Real Change or Rhetoric?," *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 11 (2002): 1.

¹² Hualing Fu, "Understanding the Evolving Relationship between the Party and the Law: The Case of China's National Supervision Commission," *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper*, no. 2020/072 (2020).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan definisi yang luas mengenai korupsi, yang mencakup tidak hanya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, tetapi juga tindakan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam ketentuannya, terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, seperti:

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
2. Suap dan gratifikasi (Pasal 5–12)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8–10)
4. Pemerasan dan perbuatan curang (Pasal 12)
5. Konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (Pasal 12A)
6. Tindak pidana pencucian uang terkait korupsi

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi¹³. Namun, revisi ini menuai kritik karena mengurangi independensi KPK dengan menempatkannya di bawah pengawasan eksekutif.

Dari segi sanksi, hukum di Indonesia menetapkan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi hukuman yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku korupsi, yang menyebabkan rendahnya efek jera. Selain itu, Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor, kecuali dalam kondisi

¹³ Tigor Einstein and Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *National Journal of Law* 3, no. 2 (2020).

tertentu seperti keadaan darurat atau bencana nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, namun hingga saat ini belum pernah diterapkan dalam kasus nyata.

Selanjutnya, China memiliki pendekatan yang jauh lebih ketat terhadap tindak pidana korupsi dibandingkan dengan Indonesia. Regulasi utama yang mengatur pemberantasan korupsi di China terdapat dalam Criminal Law of the People's Republic of China (hukum pidana China) serta diperkuat oleh berbagai kebijakan anti-korupsi yang dikeluarkan oleh Partai Komunis China (PKC). Dalam hukum pidana China, tindak pidana korupsi secara umum diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, di antaranya:

1. Penyuapan (bribery) dalam bentuk aktif maupun pasif
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan
3. Penggelapan dan penyimpangan dana publik
4. Pencucian uang yang berkaitan dengan hasil korupsi

Perbedaan paling signifikan dalam regulasi China adalah adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berat yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan Amandemen ke-9 Criminal Law of China (2015), hukuman mati dapat dijatuhkan kepada koruptor yang terbukti menerima suap dalam jumlah lebih dari 3 juta yuan (sekitar 6,5 miliar rupiah)¹⁴. Namun, hukuman mati tidak selalu langsung dieksekusi, melainkan dapat diberikan dalam bentuk penundaan dua tahun, yang berarti jika terdakwa menunjukkan perilaku baik selama masa itu, hukumannya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup.

Selain peraturan pidana, China juga memiliki instrumen hukum administratif yang sangat ketat dalam pencegahan korupsi, seperti Regulations on the Punishment of Civil Servants of Administrative Organs yang mengatur sanksi disipliner bagi pegawai negeri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. China

¹⁴ Tobias Smith and Su Jiang, "Making Sense of Life without Parole in China," *Punishment & Society* 21, no. 1 (2019): 70–88.

juga memperkuat pemberantasan korupsi melalui lembaga khusus seperti Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) yang berperan dalam mengawasi dan menindak pejabat negara yang terlibat korupsi, terutama dalam lingkup Partai Komunis China.

Sanksi dan Hukuman

Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur secara rinci mengenai sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hukuman bagi koruptor bervariasi tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Beberapa bentuk sanksi pidana yang diatur dalam UU Tipikor, antara lain:

1. Pidana penjara: Koruptor dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari minimal 1 tahun hingga seumur hidup, tergantung pada besarnya kerugian negara dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Misalnya, Pasal 2 UU Tipikor menyebutkan bahwa pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara dapat dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup dalam kasus tertentu.
2. Denda: UU Tipikor juga menetapkan sanksi denda bagi koruptor yang berkisar antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar, sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.
3. Pengembalian kerugian negara: Selain pidana badan dan denda, pelaku korupsi juga diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara.
4. Pencabutan hak politik dan jabatan publik: Dalam beberapa kasus, koruptor dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik, seperti larangan untuk menduduki jabatan publik dalam waktu tertentu.

Meskipun UU Tipikor memiliki ketentuan hukuman yang berat, dalam praktiknya, masih sering terjadi inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Banyak

kasus korupsi besar yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan remisi yang memungkinkan terpidana bebas lebih cepat dari masa hukuman yang seharusnya dijalani. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, sebenarnya ada opsi hukuman mati bagi koruptor yang melakukan kejahatan dalam kondisi tertentu, seperti saat bencana alam atau krisis nasional, tetapi hingga saat ini ketentuan tersebut belum pernah diterapkan dalam kasus nyata.

Selanjutnya, China memiliki sistem hukum yang jauh lebih keras terhadap pelaku korupsi. Berdasarkan Criminal Law of the People's Republic of China, tindakan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan berat yang dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada koruptor di China jauh lebih tegas dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa bentuk sanksi pidana yang berlaku di China antara lain:

1. Pidana penjara: Pelaku tindak pidana korupsi di China dapat dijatuhi hukuman penjara yang berkisar dari minimal 3 tahun hingga seumur hidup, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan.
2. Hukuman mati: Salah satu perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan China adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor berat. Berdasarkan Amandemen ke-9 Criminal Law of China (2015), pelaku korupsi yang menerima suap lebih dari 3 juta yuan (sekitar Rp6,5 miliar) dapat dijatuhi hukuman mati¹⁵. Namun, hukuman mati ini umumnya disertai dengan masa percobaan dua tahun, yang berarti jika terpidana menunjukkan perilaku baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.
3. Penyitaan aset dan denda besar: Selain pidana penjara dan hukuman mati, pemerintah China juga menerapkan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, pelaku bisa dikenakan denda yang sangat besar, tergantung pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

¹⁵ Genlin Liang, "The Vicissitudes of Chinese Criminal Law and Theory: A Study in History, Culture and Politics," *Peking University Law Journal* 5, no. 1 (2017): 25–49.

4. Pecat dan larangan menduduki jabatan publik: Pejabat pemerintah atau anggota Partai Komunis China (PKC) yang terbukti melakukan korupsi akan dipecat secara tidak hormat dan dilarang untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan atau politik seumur hidup.

China memiliki kebijakan yang lebih represif dalam menangani korupsi, terutama melalui lembaga pengawas seperti Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) yang memiliki kewenangan untuk menindak pejabat partai yang terlibat dalam skandal korupsi. Selain itu, penegakan hukum terhadap korupsi di China sering kali dilakukan secara cepat dan tanpa banyak intervensi politik, sehingga memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.

2. Sistem Pencegahan Korupsi di Indonesia dan China

Indonesia memiliki berbagai mekanisme untuk mencegah korupsi, yang melibatkan regulasi, lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam pencegahan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, terdapat lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turut berperan dalam pengawasan keuangan negara.

Pencegahan korupsi di Indonesia juga dilakukan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (sebagaimana telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019)¹⁶. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi negara, mengatur pelaporan kekayaan pejabat publik, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan.

¹⁶ Prila Desita Putri and Septi Nurwijayanti, "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–197.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang diterapkan adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meminimalisir interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat dalam pelayanan publik. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan e-budgeting, e-procurement, dan e-tax untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun, meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen pencegahan, efektivitasnya masih menghadapi banyak kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem pencegahan korupsi di Indonesia meliputi lemahnya pengawasan internal di institusi pemerintahan, rendahnya budaya anti-korupsi di kalangan birokrat, serta masih adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan praktik korupsi tetap berlangsung. Selain itu, pelemahan KPK melalui revisi undang-undang pada tahun 2019 menyebabkan berkurangnya kewenangan lembaga ini, yang berdampak pada menurunnya efektivitas pencegahan korupsi.

Selanjutnya, China memiliki sistem pencegahan korupsi yang sangat ketat dan represif, dengan pendekatan yang lebih agresif dibandingkan Indonesia. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah kampanye anti-korupsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping, yang dimulai sejak 2012. Kampanye ini berhasil menindak ribuan pejabat, termasuk pejabat tinggi dalam pemerintahan dan militer, serta anggota Partai Komunis China (PKC) yang terlibat dalam korupsi.

Sistem pencegahan korupsi di China dikendalikan oleh berbagai lembaga, terutama Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), yang memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki dan menindak pejabat yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, terdapat badan lain seperti National Supervisory Commission (NSC) yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh pegawai negeri sipil dan pejabat negara dalam upaya pencegahan korupsi.

Dari segi regulasi, China menerapkan berbagai aturan yang sangat ketat, seperti Criminal Law of the People's Republic of China dan Anti-Unfair Competition Law yang mengatur larangan terhadap suap, penyalahgunaan

kekuasaan, serta penggelapan dana publik. Selain itu, China juga menerapkan aturan "zero tolerance" terhadap korupsi, yang memungkinkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku korupsi dalam skala besar ¹⁷.

China juga mengadopsi berbagai kebijakan berbasis teknologi dalam pencegahan korupsi, seperti penggunaan sistem pemantauan elektronik untuk transaksi keuangan pejabat, serta pengembangan sistem pelaporan daring (whistleblower system) yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara anonim. Sistem pengawasan internal dalam partai dan birokrasi juga diperkuat melalui mekanisme rotasi jabatan dan audit berkala guna mencegah pejabat membangun jaringan korupsi dalam suatu institusi.

Meskipun sistem pencegahan korupsi di China sangat ketat, beberapa kritik tetap muncul terkait dengan pendekatan yang terlalu keras dan kurangnya independensi lembaga pengawas. Beberapa pihak menilai bahwa kampanye anti-korupsi di China sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik Presiden Xi Jinping, alih-alih sebagai upaya murni dalam memberantas korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran sub rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum, peraturan perundang-undangan, dan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan China memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia menganut sistem civil law yang berorientasi pada due process of law dengan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, sementara China menerapkan sistem socialist law yang lebih represif dengan pengawasan ketat dari Partai Komunis China melalui CCDI dan NSC. Dari segi regulasi, Indonesia mengatur tindak pidana korupsi melalui UU Tipikor yang menekankan pemidanaan berbasis keuangan negara, sedangkan China mengatur korupsi dalam Criminal Law of China dengan

¹⁷ Zhenjie Zhou, "Life Imprisonment without Parole in China: A Policy Perspective" (Waseda University, 2020).

pendekatan yang lebih keras, termasuk hukuman mati bagi koruptor dengan nilai kerugian sangat besar. Dalam hal sanksi, Indonesia menetapkan hukuman maksimal seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar, namun penerapannya sering kali dinilai tidak memberikan efek jera, sementara China memiliki hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati yang dapat diterapkan dalam kasus tertentu.

Berdasarkan penjabaran sub rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa sistem pencegahan korupsi di Indonesia dan China memiliki pendekatan yang berbeda, mencerminkan perbedaan sistem politik dan hukum di masing-masing negara. Indonesia menerapkan strategi pencegahan berbasis regulasi, transparansi, dan digitalisasi pelayanan publik dengan melibatkan berbagai lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, budaya anti-korupsi yang belum kuat, serta pelemahan institusi pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK. Di sisi lain, China mengadopsi pendekatan yang lebih represif dengan pengawasan ketat dari CCDI dan NSC, serta menerapkan kebijakan "zero tolerance" yang memungkinkan hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam skala besar. Penggunaan teknologi dalam pemantauan keuangan pejabat dan sistem pelaporan daring juga menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi di China.

Daftar Pustaka

Ahmad, Habsy, and Chairul Amri. "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.

Christian, Natalis, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, and Mellinda Vellin. "Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 315–329.

Deng, Jinting. "The National Supervision Commission: A New Anti-Corruption Model in China." *International Journal of Law, Crime and Justice* 52 (2018): 58–73.

- Dobinson, Ian. "The Criminal Law of the People's Republic of China (1997): Real Change or Rhetoric?" *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 11 (2002): 1.
- Einstein, Tigor, and Ahmad Ramzy. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *National Journal of Law* 3, no. 2 (2020).
- Fu, Hualing. "Understanding the Evolving Relationship between the Party and the Law: The Case of China's National Supervision Commission." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper*, no. 2020/072 (2020).
- Index, Corruption Perceptions. "Transparency International, Corruption Perceptions Index." URL: <https://www.transparency.org/cpi2021> (2022).
- Liang, Genlin. "The Vicissitudes of Chinese Criminal Law and Theory: A Study in History, Culture and Politics." *Peking University Law Journal* 5, no. 1 (2017): 25–49.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Putri, Prila Desita, and Septi Nurwijayanti. "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–197.
- Sani, Nurulia Tiara, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin. "25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 897–906.
- Smith, Tobias, and Su Jiang. "Making Sense of Life without Parole in China." *Punishment & Society* 21, no. 1 (2019): 70–88.
- Soekanto, Soerjono. "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).

Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.

Syaifulloh, Abvianto. "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64.

Zemin, Jiang. "Criminal Law of the People's Republic of China." *Chinese L. & Gov't* 45 (2012): 53.

Zhou, Zhenjie. "Life Imprisonment without Parole in China: A Policy Perspective." Waseda University, 2020.